Makna Partisipasi Politik Bagi Generasi Z di Era digitalisasi

The Meaning of Political Participation for Generation Z in the Digital Era

Anika Lukman Hidayat[1], Faiz Izzuddin[2]

Universitas Pamulang, Serang, Indonesia[1,2]

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 01 No. 02
Hal : 60 - 70
Diterbitkan : 12 Desember 2025

Korespondensi
No Handphone: +6281210750292
E-mail: izzufaiz7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna partisipasi politik bagi Generasi Z di era digitalisasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi aktivitas politik daring, penelitian ini mengungkap perubahan signifikan dalam cara Generasi Z memahami dan terlibat dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik dipahami sebagai ekspresi identitas, didominasi oleh arena media sosial, dan bersifat isu-sentris serta fleksibel. Digitalisasi tidak hanya mengubah bentuk partisipasi, tetapi juga membentuk ulang pola pikir politik generasi muda. Pembahasan menunjukkan bahwa fenomena ini melahirkan bentuk baru aktivisme digital sekaligus menghasilkan tantangan seperti misinformasi dan bias algoritma. Penelitian ini menegaskan perlunya redefinisi konsep partisipasi politik dalam konteks masyarakat digital.

Kata Kunci: Antisipasi Politik, Partisipasi Politik, Era Digitalisasi, Generasi-Z

A b s t r a c t

This study aims to analyze the meaning of political participation for Generation Z in the digital era. Using a qualitative approach with in-depth interviews and observations of online political activities, this study reveals significant changes in how Generation Z understands and engages with politics. The results show that political participation is understood as an expression of identity, dominated by social media, and is issue-centric and flexible. Digitalization is not only changing the form of participation but also reshaping the political mindset of the younger generation. The discussion shows that this phenomenon has given rise to new forms of digital activism while also generating challenges such as misinformation and algorithmic bias. This study emphasizes the need to redefine the concept of political participation in the context of a digital society.

Keywords: Political Anticipation, Political Participation, Digitalization Era, Generation-Z

Pendahuluan

Generasi Z merepresentasikan kelompok demografi yang berkembang dalam ekosistem yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital, sehingga menjadikan mereka sebagai digital native yang autentik. Kedekatan inheren dengan perangkat genggam dan berbagai jenis teknologi tersebut secara fundamental membentuk pola interaksi mereka, termasuk dalam domain politik. Mereka bukan sekadar kelompok pemilih pemula, melainkan aktor yang memiliki potensi signifikan untuk memengaruhi dinamika politik kontemporer di Indonesia, mengingat dominasi proporsi suara mereka

dalam beberapa kontestasi pemilihan umum. Partisipasi politik dalam bentuk menonton, membaca, dan mencari informasi politik lebih sering dilakukan oleh generasi Z dibandingkan dengan partisipasi yang melibatkan interaksi dengan orang lain, seperti berinteraksi dan memengaruhi individu untuk memilih kandidat tertentu (Yolanda & Halim, 2020). Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna partisipasi politik bagi generasi ini menjadi krusial dalam konteks perkembangan demokrasi digital.

Selain faktor teknologi, dinamika sosial-budaya memainkan peran signifikan dalam membentuk pola dan orientasi partisipasi politik Generasi Z. Lingkungan sosial yang semakin plural, terbuka, dan terhubung secara global membuat Generasi Z terpapar pada beragam nilai, ideologi, serta isu-isu lintas batas yang sebelumnya tidak mudah diakses oleh generasi terdahulu. Keterpaparan terhadap isu-isu global tersebut berkontribusi pada pembentukan orientasi politik yang cenderung lebih progresif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Generasi Z menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, hak-hak minoritas, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Keterlibatan mereka dalam isu-isu tersebut sering kali dimediasi oleh konten digital seperti kampanye visual, microblog, infografik, dan video pendek yang dirancang secara naratif dan persuasif, sehingga memungkinkan penyebaran gagasan secara cepat dan luas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa makna partisipasi politik bagi Generasi Z tidak lagi terbatas pada relasi dengan institusi politik formal, melainkan juga mencakup keterlibatan dalam gerakan sosial berbasis komunitas digital yang bersifat cair, tematik, dan berbasis solidaritas nilai (Sari et al., n.d.).

Di sisi lain, transformasi partisipasi politik Generasi Z tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi digital yang membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk baru partisipasi politik berbasis kreator (*creator-based participation*). Dalam konteks ini, Generasi Z tidak hanya berperan sebagai konsumen pasif informasi politik, tetapi juga sebagai produsen aktif yang menciptakan dan mendistribusikan konten politik melalui berbagai platform digital. Konten tersebut dapat berupa vlog, infografik, meme politik, video pendek, maupun ulasan singkat yang merepresentasikan sikap dan preferensi politik tertentu. Bentuk partisipasi kreatif ini memiliki implikasi strategis karena memungkinkan individu Generasi Z untuk berfungsi sebagai *opinion leader* dalam jejaring sosialnya, meskipun tidak memiliki posisi formal dalam struktur politik konvensional. Melalui logika algoritma dan distribusi digital, pesan politik yang diproduksi secara individual dapat menjangkau audiens luas dan memengaruhi opini publik. Dengan demikian, partisipasi politik Generasi Z mengalami pergeseran menuju model partisipasi yang lebih kolaboratif, desentralistik, dan berbasis produksi konten, yang menantang dominasi aktor politik tradisional dalam pembentukan wacana publik (Saud & Margono, 2021).

Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya kemunculan media baru (*new media*) seperti Instagram, Twitter/X, TikTok, dan YouTube, telah mentransformasi lanskap partisipasi politik secara signifikan. Digitalisasi tidak hanya menyediakan saluran alternatif dalam mengakses informasi politik, tetapi juga menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan partisipasi berlangsung secara lebih inklusif, cepat, dan multidimensional. Media digital menghadirkan apa yang dapat dipahami sebagai "ruang demokrasi digital yang inklusif", di mana batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi semakin kabur (Hemastuti et al., 2025). Partisipasi politik yang sebelumnya diidentikkan dengan aktivitas konvensional seperti pemungutan suara, keanggotaan partai, atau keikutsertaan dalam kampanye formal kini berkembang ke arah bentuk-bentuk non-konvensional berbasis daring. Bentuk-bentuk tersebut meliputi ekspresi opini politik di media sosial, pengorganisasian aksi sosial melalui platform digital, serta keterlibatan dalam diskusi dan deliberasi politik secara daring. Transformasi ini menunjukkan adanya perluasan makna partisipasi politik yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat digital (Wibowo, 2017).

Generasi Z, yang secara umum lahir pada rentang tahun 1995–2010, tumbuh dan berkembang dalam ekosistem sosial yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan media sosial. Kondisi ini menjadikan modus akuisisi informasi, pembentukan jejaring sosial, serta pola partisipasi politik mereka berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Solihat, 2024). Platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter/X, serta aplikasi pesan instan berfungsi tidak hanya sebagai sumber utama informasi dan berita politik, tetapi juga sebagai ruang diskusi dan instrumen mobilisasi sosial. Akibatnya, bentuk partisipasi politik Generasi Z meluas dari aktivitas formal seperti pemungutan suara menuju tindakan-tindakan digital, termasuk mempublikasikan opini politik, membagikan atau menandai konten kampanye, serta berpartisipasi dalam aksi kolektif daring. Pola ini mencerminkan pergeseran partisipasi politik dari ranah institusional menuju ruang digital yang lebih fleksibel, personal, dan berbasis jaringan (Beriansyah & Qibtiyah, 2023).

Secara kualitatif, di berbagai negara termasuk Indonesia, proporsi pemilih muda yang mencakup Generasi Z menunjukkan kecenderungan meningkat dan menjadi kelompok strategis dalam kontestasi politik elektoral. Pada pemilihan umum terakhir, Generasi Z muncul sebagai segmen pemilih penting yang menarik perhatian aktor politik dan partai, sehingga memengaruhi perubahan strategi komunikasi politik. Strategi tersebut kini semakin diarahkan pada penggunaan konten visual singkat, narasi yang ringkas, serta format komunikasi *mobile-first* yang sesuai dengan kebiasaan konsumsi media Generasi Z. Konsekuensinya, makna partisipasi politik bagi Generasi Z tidak lagi semata-mata diukur dari kehadiran fisik dalam aktivitas politik formal, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam memproduksi narasi politik, membentuk opini kolektif, serta memengaruhi agenda publik melalui ruang digital. Dengan demikian, partisipasi politik dipahami sebagai proses simbolik dan komunikatif yang berlangsung secara intens di media sosial (Suryawijaya et al., 2025).

Namun demikian, era digital juga menghadirkan paradoks dalam partisipasi politik Generasi Z. Di satu sisi, digitalisasi secara signifikan menurunkan hambatan akses terhadap informasi politik dan memperluas peluang keterlibatan, sehingga menciptakan tingkat inklusivitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, ruang digital juga memunculkan berbagai tantangan, seperti maraknya misinformasi dan disinformasi, fenomena *slacktivism* atau aktivisme permukaan yang minim dampak substantif, terbentuknya gelembung informasi (*filter bubbles*), serta meningkatnya risiko polarisasi dan agresi daring. Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna partisipasi politik bagi Generasi Z. Partisipasi tidak dapat semata-mata diukur dari intensitas atau frekuensi keterlibatan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas keterlibatan tersebut, termasuk kedalaman literasi politik, kapasitas berpikir kritis, serta keberlanjutan tindakan politik yang dilakukan. Oleh karena itu, partisipasi politik Generasi Z perlu dipahami sebagai sebuah spektrum yang mengintegrasikan dimensi kuantitatif dan kualitatif secara simultan (Olaniran & Williams, 2020).

Temuan penelitian (Olaniran & Williams, 2020) terkait hubungan antara Generasi Z dan partisipasi digital menyimpulkan bahwa meskipun teknologi telah mengurangi hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, kemudahan ini sering kali mengarah pada fenomena "slacktivism", di mana partisipasi tersebut cenderung bersifat dangkal dan memiliki dampak nyata yang minimal. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa status Generasi Z sebagai native digital tidak secara otomatis menjamin literasi digital kritis yang kuat, sehingga mereka menjadi rentan terhadap disinformasi serta manipulasi narasi di media sosial.

Temuan penelitian (Wibowo, 2017) dalam jurnal Transformasi Bentuk Partisipasi Politik Konvensional dan Non-Konvensional di Era Digital menyimpulkan bahwa kemunculan teknologi digital telah menyebabkan perluasan dan transformasi signifikan pada bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat, melampaui kegiatan konvensional. Transformasi utama yang terjadi adalah pergeseran atau

perluasan dari partisipasi yang hanya identik dengan kegiatan tatap muka atau formal (seperti memilih dalam pemilu atau menjadi anggota partai) menjadi bentuk partisipasi non-konvensional yang bersifat digital atau online.

Hasil penelitian (Yolanda & Halim, 2020) menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan antusiasme dan kesadaran politik Generasi Z. Namun, partisipasi mereka sebagian besar bersifat individual—berupa menonton, membaca, dan mencari informasi politik—dan bukan interaksi langsung atau upaya memengaruhi orang lain, sehingga didominasi oleh bentuk keterlibatan digital berintensitas rendah.

Hasil penelitian (Beriansyah & Qibtiyah, 2023) menunjukkan bahwa media sosial, khususnya Instagram, berperan penting sebagai alat komunikasi dan sumber literasi bagi Generasi Z, yang merupakan digital native. Kedekatan Gen Z dengan media sosial ini secara signifikan memengaruhi partisipasi politik mereka, karena platform tersebut menjadi rujukan utama untuk mengakses informasi tentang isu-isu sosial dan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gen Z diharapkan memiliki pengetahuan politik yang baik dan dapat lebih terlibat dalam kegiatan politik, baik konvensional (seperti memilih) maupun non-konvensional (seperti diskusi dan petisi online), terutama dengan memanfaatkan fitur-fitur instan yang disediakan oleh media sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena partisipasi politik Gen Z kini semakin bergeser ke ruang digital melalui platform e-participation, aplikasi konsultasi publik, dan petisi daring. Meskipun menawarkan peluang untuk memperkuat keterlibatan politik, efektivitasnya sangat bergantung pada literasi digital, desain platform, aksesibilitas, dan legitimasi institusional. Memahami bagaimana praktik digital membentuk perilaku politik dan diterjemahkan ke dalam pengaruh di ruang politik konvensional menjadi krusial agar partisipasi Gen Z tidak berhenti pada aktivitas simbolik, tetapi benar-benar berdampak.Selain itu, kemunculan alat partisipasi digital (platform e-participation, aplikasi konsultasi publik, petisi daring) membuka peluang untuk memperkuat partisipasi yang bermakna bila disertai literasi digital dan politik yang memadai namun efektivitas alat tersebut bergantung pada desainnya, aksesibilitas, serta legitimasi institusionalnya. Oleh karena itu penelitian tentang makna partisipasi politik Gen Z perlu memperhatikan aspek sosioteknis: bagaimana platform membentuk perilaku, bagaimana konten diproduksi dan dikonsumsi, dan bagaimana praktik digital diterjemahkan menjadi pengaruh di ruang politik konvensional (Shin et al., 2024).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif atau fenomenologi untuk menggali secara mendalam makna partisipasi politik bagi Generasi Z di era digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena orientasi utama penelitian bukan terletak pada pengukuran variabel secara kuantitatif, melainkan pada upaya memahami realitas sosial sebagaimana dialami dan dimaknai oleh subjek penelitian. Dalam kerangka fenomenologi, peneliti berfokus pada proses pemahaman makna subjektif (*verstehen*), yakni bagaimana Generasi Z menafsirkan pengalaman partisipasi politik mereka di ruang digital. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis tertentu atau menghasilkan generalisasi statistik, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan holistik mengenai perubahan cara pandang, motivasi, serta bentuk-bentuk keterlibatan politik yang muncul akibat digitalisasi. Dengan demikian, pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti menggambarkan secara komprehensif dinamika pengalaman politik Generasi Z, sekaligus mengungkap bagaimana teknologi digital telah membentuk konstruksi makna partisipasi politik mereka dalam kehidupan sehari-hari (Putra et al., 2024).

Dalam penelitian fenomenologis, pengalaman subjektif diposisikan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana individu membangun dan memaknai realitas sosial yang mereka hadapi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa makna partisipasi politik tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan dikonstruksikan melalui pengalaman personal dan interaksi sosial yang dialami oleh individu. Generasi Z, sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan teknologi digital, memiliki pengalaman politik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Keterlibatan politik mereka tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas konvensional seperti keanggotaan organisasi, keikutsertaan dalam kampanye, atau partisipasi dalam pemilu, tetapi juga melalui praktik digital seperti berbagi informasi politik, memproduksi konten, berkomentar, serta terlibat dalam diskursus politik di media sosial. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti menangkap pengalaman autentik Generasi Z dalam memaknai partisipasi politik sebagai bagian dari aktivitas keseharian yang terintegrasi dengan penggunaan teknologi digital. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi subjek penelitian untuk merefleksikan pengalaman mereka secara mendalam, sehingga makna partisipasi politik dapat dipahami dari sudut pandang mereka sendiri (Farid & Sos, 2018).

Fenomenologi juga memberikan kerangka analitis yang memadai bagi peneliti untuk memahami konteks sosial dan teknologi yang membentuk pola partisipasi politik Generasi Z. Dalam era digital, realitas politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh institusi formal seperti partai politik, pemerintah, atau media arus utama, tetapi juga oleh arus informasi digital yang bergerak cepat, masif, dan lintas batas. Media sosial, platform berbagi video, dan ruang diskursus daring telah menjadi arena utama bagi Generasi Z dalam mengakses, menafsirkan, dan merespons isu-isu politik. Dalam konteks ini, Generasi Z memaknai partisipasi politik sebagai aktivitas yang bersifat spontan, fleksibel, dan tidak selalu terikat oleh struktur formal. Keterlibatan politik mereka sering kali dipicu oleh isu-isu global maupun lokal yang viral di media digital, serta dipengaruhi oleh jejaring sosial daring yang mereka miliki. Pendekatan fenomenologis membantu peneliti mengurai bagaimana perubahan ekologi informasi digital tersebut memengaruhi cara Generasi Z membangun kesadaran politik, menentukan sikap, dan mengekspresikan partisipasi politiknya. Dengan demikian, fenomenologi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara teknologi digital, pengalaman subjektif, dan konstruksi makna partisipasi politik di kalangan generasi muda (Santoso & Putra, 2024).

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah keterangan lisan dan perilaku yang diperoleh langsung dari informan kunci, yaitu Generasi Z (kelompok usia sekitar 13-28 tahun saat ini) yang memiliki keterlibatan dalam isu-isu politik digital. Data sekunder adalah data pendukung, seperti dokumen, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi politik Gen Z dan digitalisasi. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali makna subjektif dan pengalaman informan secara rinci, khususnya mengenai motif dan bentuk partisipasi politik mereka di platform digital (Alya, 2025). Teknik ini didukung oleh observasi non-partisipatif terhadap aktivitas digital mereka (misalnya unggahan, interaksi, atau diskusi di media sosial terkait isu politik) untuk mengamati pola partisipasi yang muncul secara daring. Studi dokumentasi atau literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan memperkuat temuan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling terkait. Tahap pertama adalah Reduksi Data, yaitu proses pemilahan, penajaman, pengelompokan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk memilih tema-tema kunci yang relevan dengan makna partisipasi politik dan digitalisasi. Tahap kedua adalah Penyajian Data, di mana data yang tereduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antar-variabel atau

antar-tema yang muncul. Tahap terakhir adalah Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, di mana kesimpulan sementara ditarik dan diverifikasi melalui peninjauan ulang data lapangan secara berulang untuk menghasilkan temuan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

Generasi Z menunjukkan kecenderungan yang substansial untuk menyalurkan artikulasi politik melalui media sosial sebagai konsekuensi langsung dari transformasi ekologi komunikasi politik di era digital. Media sosial menawarkan kecepatan, kepraktisan, dan fleksibilitas yang tidak ditemukan dalam saluran partisipasi politik konvensional yang bersifat birokratis dan prosedural. Dalam konteks ini, partisipasi digital dipersepsikan lebih inklusif karena memungkinkan individu menyuarakan pendapat tanpa harus memiliki afiliasi organisasi atau akses ke institusi formal. Lingkungan digital juga menciptakan ruang artikulasi yang luas, di mana Generasi Z dapat berinteraksi secara langsung dengan audiens yang masif dan heterogen. Aspek anonimitas relatif pada platform tertentu turut memperkuat keberanian berpendapat, terutama bagi individu yang cenderung pasif dalam diskursus politik tatap muka. Fleksibilitas akses melalui perangkat bergerak menjadikan media sosial medium paling nyaman dan relevan bagi Generasi Z sebagai digital native, yang secara fundamental membentuk pola interaksi politik mereka (Loader et al., 2014).

Dalam memantau dinamika isu politik, Generasi Z secara dominan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) sebagai infrastruktur utama konsumsi informasi politik. Platform berbasis visual seperti Instagram dan TikTok diminati karena menyajikan konten politik dalam format ringkas, visual, dan naratif, sehingga lebih mudah dipahami serta selaras dengan pola atensi generasi ini. Konten seperti infografik, video pendek, dan kampanye visual memungkinkan difusi pesan politik secara cepat dan emosional. Sementara itu, X (Twitter) berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang dinamis, menyediakan pembaruan isu secara real-time serta memungkinkan komparasi berbagai sudut pandang melalui fitur thread dan trending topics. Dengan demikian, platform-platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber berita, tetapi juga sebagai arena dialog dan instrumen mobilisasi politik, yang membentuk apa yang disebut sebagai ruang demokrasi digital (Gil de Zúñiga et al., 2012).

Impetus utama keterlibatan politik digital Generasi Z didorong oleh kepedulian terhadap isu-isu sosial dan keinginan untuk berkontribusi dalam perubahan sosial. Akses informasi yang luas dan cepat meningkatkan kesadaran mereka terhadap berbagai problematika publik, seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, perubahan iklim, dan transparansi pemerintahan. Partisipasi politik mereka tidak lagi terbatas pada konsumsi informasi, tetapi berkembang menjadi bentuk aktivisme digital kreatif. Generasi Z secara aktif memproduksi konten politik berupa vlog, meme, infografik, dan microblog yang merefleksikan posisi ideologis tertentu. Pola ini menempatkan mereka sebagai produsen sekaligus distributor pesan politik, yang berpotensi berperan sebagai opinion leader dalam jejaring digital. Model partisipasi ini bersifat kolaboratif, desentralistik, dan berbasis produksi konten, sehingga menggeser paradigma partisipasi politik dari sekadar keikutsertaan menuju pembentukan narasi dan opini kolektif (Bennett, 2012).

Meskipun digitalisasi memperluas inklusivitas partisipasi politik, era ini juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama terkait misinformasi, polarisasi, dan agresi daring. Media sosial rentan menjadi medium penyebaran hoaks, disinformasi, dan narasi manipulatif yang dapat memengaruhi persepsi politik Generasi Z. Intensitas diskursus yang tinggi, disertai komentar negatif dan serangan verbal, berpotensi menciptakan iklim komunikasi yang tidak sehat dan memperdalam polarisasi politik. Kondisi ini mendorong sebagian individu untuk bersikap lebih hati-hati atau bahkan menarik diri dari

keterlibatan politik digital. Selain itu, kemudahan berpartisipasi sering kali memunculkan fenomena slacktivism, yaitu bentuk aktivisme dangkal yang minim dampak substantif. Partisipasi lebih banyak didominasi oleh konsumsi informasi dibandingkan keterlibatan deliberatif atau tindakan kolektif yang berkelanjutan (Allcott & Gentzkow, 2017).

Di tengah derasnya arus informasi digital yang ditandai oleh kecepatan distribusi, volume konten yang masif, serta minimnya proses kurasi, Generasi Z menunjukkan kapasitas literasi digital yang relatif kritis dalam memaknai konten politik yang mereka konsumsi. Berbeda dengan asumsi bahwa generasi muda bersifat pasif dan mudah terpengaruh oleh arus informasi daring, Generasi Z justru menampilkan kecenderungan untuk tidak serta-merta menerima informasi politik yang beredar di media sosial. Mereka secara aktif menerapkan proses verifikasi mandiri sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi tersebut. Praktik verifikasi ini mencakup perbandingan informasi dari berbagai sumber media, pengecekan kredibilitas akun resmi, serta evaluasi konsistensi data, narasi, dan konteks pemberitaan. Selain itu, observasi terhadap dinamika diskursus publik seperti membaca kolom komentar, menilai respons pengguna lain, serta mencermati perdebatan yang terjadi menjadi bagian integral dari strategi penyaringan informasi. Pola ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi politik, tetapi juga sebagai evaluator aktif yang berupaya meminimalkan risiko misinformasi dan manipulasi opini. Sikap reflektif tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik bagi Generasi Z tidak semata dimaknai sebagai ekspresi opini atau sikap politik di ruang digital, melainkan juga sebagai proses kognitif yang melibatkan kemampuan berpikir kritis, penalaran rasional, serta kesadaran akan kompleksitas informasi politik di era digitalisasi (Nyhan & Reifler, 2010).

Secara holistik, temuan ini menegaskan bahwa partisipasi politik Generasi Z di era digital memiliki karakter yang lebih luas, dinamis, reflektif, dan selektif, serta sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekosistem media sosial yang cair dan interaktif. Partisipasi politik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keterlibatan dalam institusi formal seperti partai politik, pemilu, atau organisasi kemasyarakatan konvensional, melainkan mengalami perluasan makna menjadi ekspresi identitas politik, keterlibatan berbasis isu, serta produksi dan distribusi wacana publik melalui platform digital. Media sosial berfungsi sebagai ruang alternatif bagi Generasi Z untuk menegosiasikan identitas politik, menyuarakan kepedulian terhadap isu-isu tertentu, serta membangun solidaritas berbasis kepentingan bersama. Namun, luasnya ruang partisipasi ini juga menuntut adanya kualitas keterlibatan yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi politik Generasi Z memerlukan penguatan literasi digital yang berkelanjutan, penyediaan informasi yang kredibel dan mudah diakses, serta penciptaan ruang diskursus daring yang konstruktif, inklusif, dan deliberatif. Dengan demikian, konsep partisipasi politik perlu direformulasi agar mampu menangkap realitas masyarakat yang semakin terdigitalisasi, sekaligus mengakomodasi pola keterlibatan generasi muda yang bersifat fleksibel, berbasis isu, dan berorientasi pada produksi makna politik di ruang publik digital (Castells, 2016).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa generasi Z cenderung merasa lebih mudah untuk menyuarakan pendapat politik melalui media sosial. Kemudahan ini muncul karena sifat platform digital yang cepat, praktis, dan memberikan ruang ekspresi yang luas tanpa harus melalui prosedur formal. Informan menyebutkan bahwa media sosial membuat mereka merasa lebih percaya diri karena pendapat dapat disampaikan secara langsung, serta memungkinkan mereka menjangkau audiens yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Selain itu, anonimitas relatif yang ditawarkan beberapa platform turut meningkatkan keberanian mereka dalam menyampaikan opini, terutama bagi individu yang cenderung pasif dalam diskusi politik tatap muka. Fenomena ini

memperkuat temuan bahwa generasi Z memiliki kecenderungan kuat untuk berpartisipasi dalam ruang digital dibandingkan ruang offline, karena ruang digital dianggap lebih inklusif dan responsif terhadap opini publik. Kemudiam juga, akses yang fleksibel dapat dilakukan kapan saja melalui ponsel menjadi alasan kuat mengapa ruang digital dianggap sebagai wadah paling nyaman untuk berpartisipasi.

Dalam mengikuti perkembangan isu politik, informan lebih banyak memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter). Instagram dan TikTok dianggap lebih menarik karena menyajikan informasi dalam format singkat dan visual sehingga lebih mudah dipahami. Sementara itu, X dipilih karena menyediakan pembaruan isu yang cepat serta diskusi yang lebih luas, Kecepatan arus informasi dan kemudahan dalam menemukan beberapa perspektif sekaligus menjadi faktor utama platform-platform ini lebih disukai oleh generasi Z. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi Z lebih mengutamakan platform yang dapat menggabungkan kecepatan informasi dengan kemudahan pemahaman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber bahwa ”*kalo Syamsul sendiri biasanya paltfrom yang digunakan seperti Instagram, TikTok, dan X, karena sejujurnya Twitter (X) itu bisa membantu banget men gakses informasi lebih cepat ketimbang Instagram dan TikTok, karena biasanya di x ini berita yang disajikan lebih hangat terkait isu yang ada*” (Syamsul.,13.00, 19 Nov 2025).

Dari sisi motivasi untuk berpartisipasi dalam politik digital, informan mengaku terdorong oleh rasa kepedulian terhadap isu sosial dan keinginan untuk ikut serta dalam perubahan. Akses informasi yang luas membuat mereka lebih sadar terhadap berbagai persoalan publik, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih aktif. Selain itu, mereka merasa bahwa kontribusi melalui ruang digital dapat memberikan pengaruh tertentu, baik melalui penyebaran informasi maupun dukungan opini terhadap isu tertentu. Namun demikian, terdapat pula hambatan yang dirasakan, seperti kekhawatiran terhadap salah informasi, ketakutan mendapatkan serangan verbal dari warganet lain, serta kecenderungan terjadinya polarisasi dalam diskusi. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa dinamika media sosial yang sering dipenuhi komentar negatif dan perdebatan keras membuat mereka berhati-hati atau bahkan enggan terlibat lebih jauh. salah satunya mengatakan “*Motivasi saya lebih ke ingin ada perubahan. Di dunia digital kan kita gampang banget akses informasi, jadi saya merasa punya tanggung jawab buat ikut bersuara. Tapi jujur, suasana media sosial itu sering nggak nyaman. Polarisasi tinggi, banyak yang suka menyerang kalau beda pendapat. Jadi ya, saya tetap ikut, cuma lebih hati-hati supaya nggak kena serangan atau debat yang nggak penting*." (Intan., 18.23, 23 Nov 2025). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik digital generasi Z tidak terlepas dari kualitas lingkungan digital tempat mereka berinteraksi.

Ketika membahas soal kredibilitas informasi politik, para informan secara konsisten menyatakan bahwa informasi di internet tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Mereka menyadari tingginya risiko hoaks, misinformasi, dan narasi manipulatif yang beredar di berbagai platform. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari narasumber yang mengatakan “*salah satu hal yang menghambat yaitu informasi yang harus dipertanggungjawabkan dan biasanya saya itu mencari informasi harus menyaring dulu sebelum di sharing Kembali dan pastinya kalo kita mendapat informasi saya juga menyari tau ini sumbernya dari mana terus jelas atau tidak dan hoaks atau tidak*.” (Fajri., 13.00, 19 Nov 2025). Oleh karena itu, mereka cenderung menerapkan proses verifikasi mandiri sebelum mempercayai atau membagikan sebuah informasi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain membandingkan informasi dari beberapa sumber, mengecek akun resmi lembaga pemerintah atau media arus utama, dan menilai konsistensi data yang disampaikan. Salah satu narasumber bahkan menilai bahwa membaca kolom komentar atau diskusi bisa membantu mengidentifikasi apakah sebuah informasi relevan dan valid “*Saya biasanya ikut berpartisipasi di isu-isu politik di media sosial karena merasa peduli saja, Kak. Banyak informasi yang muncul setiap hari, jadinya saya lebih paham*

masalah-masalah yang lagi terjadi. Kalau saya share atau kasih opini, rasanya seperti ikut menyuarakan sesuatu yang penting. Tapi kadang saya ragu juga, takut kalau informasi yang saya bagikan ternyata salah. Selain itu, komentar warganet yang suka kasar bikin saya mikir dua kali buat ikut nimbrung di diskusi." (Radiana., 15.05, 19 Nov 2025). Wawancara ini menunjukkan bahwa generasi Z memiliki literasi digital yang cukup kritis, meskipun tetap rentan terhadap arus informasi yang massif dan cepat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menggambarkan bahwa ruang digital memainkan peran sentral dalam membentuk pola partisipasi politik generasi Z. Media sosial bukan hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi, tetapi juga sebagai sumber informasi dan ruang interaksi politik. Namun, partisipasi tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika platform digital yang tidak selalu kondusif, terutama terkait kepercayaan informasi dan risiko polarisasi. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi politik generasi Z di era digitalisasi bersifat kompleks: mereka aktif, kritis, dan responsif, tetapi juga selektif dan berhati-hati dalam menyikapi isu politik di ruang online. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa peningkatan literasi digital, kualitas informasi, dan ruang diskusi yang sehat menjadi faktor penting dalam memperkuat partisipasi politik generasi Z dalam ruang digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bagi generasi Z pada era digitalisasi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan bentuk partisipasi konvensional. Bagi mereka, ruang digital merupakan wadah yang memberikan akses mudah, cepat, dan fleksibel untuk menyuarakan pendapat, memperoleh informasi, serta terlibat dalam diskusi politik. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi kanal utama yang dimanfaatkan karena mampu menghadirkan informasi politik dalam format yang singkat, visual, dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik generasi Z. Motivasi generasi ini untuk berpartisipasi berkaitan dengan meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu publik dan keinginan untuk mengambil peran dalam perubahan sosial.

Namun partisipasi tersebut tidak lepas dari hambatan, seperti kekhawatiran terhadap penyebaran hoaks, polarisasi, serta potensi serangan verbal di ruang digital. Meski demikian, generasi Z menunjukkan sikap kritis melalui upaya verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, yang menandakan tingkat literasi digital yang cukup matang. Secara keseluruhan, makna partisipasi politik bagi generasi Z tidak hanya berkaitan dengan tindakan menyampaikan pendapat, tetapi juga mencakup proses mencari, mengolah, dan menilai informasi secara cermat di tengah derasnya arus informasi digital. Partisipasi politik digital bagi mereka merupakan bentuk keterlibatan yang dinamis, reflektif, dan selektif, yang dipengaruhi oleh karakteristik media sosial itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa untuk memperkuat kualitas partisipasi politik generasi Z, diperlukan peningkatan literasi digital, penyediaan informasi yang kredibel, serta lingkungan diskusi digital yang lebih sehat dan konstruktif.

Daftar Pustaka

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). *Social Media and Fake News in the 2016 Election*. *31*(2), 211–236.

Alya, H. &. (2025). *PARTISIPASI POLITIK GEN Z DALAM MEDIA SOSIAL X (STUDI KUALITATIF PADA PENGIKUT AKUN X@ aniesbubble)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Bennett, W. Lance. (2012). The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *644*(1), 20–39. https://doi.org/10.1177/0002716212451428

Beriansyah, A., & Qibtiyah, M. (2023). *Instagram and political literacy generation Z. Bhineka Tunggal*

Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN, 10 (1), 134-149.

Castells, M. (2016). A sociology of power: My intellectual journey. *Annual Review of Sociology*, *42*(1), 1–19.

Farid, M., & Sos, M. (2018). *Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial*. Prenada Media.

Gil de Zúñiga, H., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *17*(3), 319–336. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x

Hemastuti, T., Hidayat, D., Nurhadi, Z. F., & Rina, N. (2025). Construction of gen Z political insights after watching'Bacapres Bicara Gagasan'on YouTube. *Jurnal ASPIKOM*, *9*(2), 315–332.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, *17*(2), 143–150. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. *(No Title)*.

Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions. *Political Behavior*, *32*(2), 303–330. https://doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2

Olaniran, B., & Williams, I. (2020). Social media effects: Hijacking democracy and civility in civic engagement. In *Platforms, protests, and the challenge of networked democracy* (pp. 77–94). Springer.

Putra, T. R., Wahyuni, R. T., Meilani, N., Anjani, M., & Sari, D. K. (2024). Paritisipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, *2*(1), 61–68.

Santoso, W., & Putra, A. K. (2024). *Geografi Urban dan Pariwisata Berkelanjutan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Sari, A. Y., Zuriah, N., & Wibowo, A. P. (n.d.). Dissemination of political issues on tiktok social media and its implications on the political attitudes of students of the University of muhammadiyah malang. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *6*(2), 432–451.

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, *18*(4), 443–454.

Shin, B., Floch, J., Rask, M., Baeck, P., Edgar, C., Berditchevskaia, A., Mesure, P., & Branlat, M. (2024). A systematic analysis of digital tools for citizen participation. *Government Information Quarterly*, *41*(3), 101954.

Solihat, M. (2024). Gen Z Communication And Political Participation in Digital Media. *International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities-Humanities and Social Sciences Track (ICOBEST-HSS 2024)*, 186–194.

Suryawijaya, T., Fauzy, M. R. N., & Maulidina, N. F. (2025). Peran media sosial dalam membentuk partisipasi politik gen Z pada pemilu 2024. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *15*(2), 125–147.

Wibowo, B. P. (2017). *Partisipasi Politik Dalam Demokrasi di Era Digital (Studi pada Website Change. org Indonesia Sebagai Platform Petisi Online)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Yolanda, H. P., & Halim, U. (2020). Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, *10*(2), 30–39.